

Kandidasi Partai Aceh Menjelang Pemilihan Gubernur 2017

Vellayati Hajad (Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Teuku Umar)

Email: vellayati.hajad@gmail.com

Abstract

This article talks about the process of candidacy within the Aceh Party ahead of the governor election in 2017. Based on the analysis, the process of candidacy happened very closed, it can be seen from the appear of the previous names to be nominated in the upcoming elections is a commander or key figure in the structure of the Gerakan Aceh Merdeka (GAM). The background of Aceh conflict made the election for governor in 2017 increasingly heated. Conflict of internal and external in society become more intense before the election date.

Keywords: *candidation, aceh party, the election of governor*

Abstrak

Tulisan ini berbicara mengenai proses kandidasi dalam tubuh Partai Aceh menjelang pemilihan gubernur serentak pada tahun 2007. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, kandidasi yang terjadi berlangsung sangat tertutup, hal ini dapat dilihat dari munculnya kembali nama-nama lama untuk dicalonkan dalam pemilihan gubernur 2017 adalah mantan panglima atau tokoh penting dalam struktur Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Latar belakang konflik yang pernah berlangsung di Aceh menjadikan pemilihan gubernur tahun 2017 semakin memanas. Konflik internal partai dan konflik eksternal di dalam masyarakat semakin sering terjadi seiring semakin dekatnya tanggal pemilihan.

Kata kunci: *kandidasi, partai aceh, pemilihan gubernur*

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian tentang partai politik yang menganalisis proses kandidasi Partai Aceh dalam menghadapi pemilihan gubernur Aceh pada tahun 2017. Prihatmoko (2005) dalam kajiannya melihat bahwa pemilihan kepala daerah (dalam hal ini gubernur) secara langsung merupakan efek kebebasan politik. Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih secara bebas dalam setiap pemilihan umum. Selanjutnya Romdlon Hidayat (2008) bahkan pernah mengatakan bahwa Aceh adalah salah satu propinsi di Indonesia yang melaksanakan pemilihan kepala daerah langsung pada tahun 2006 sebagai strategi untuk menyelesaikan konflik politik. Momen itu dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh untuk menata kembali sistem politik dan demo-

krasi di Aceh terutama terkait memilih pemimpin yang merakyat dan peduli terhadap pembangunan di Aceh.

Menjelang pemilihan gubernur Aceh 2017 partai politik termasuk Partai Aceh sebagai salah satu partai lokal sibuk menjaring, menyeleksi dan menempatkan kader-kader yang akan diadu sebagai calon yang akan diusung sebagai gubernur. Beberapa nama yang muncul seperti Zaini Abdullah, Muzakir Manaf, dan Zakaria Saman. Hal yang menarik adalah ketiga tokoh ini merupakan "orang penting" dalam struktur Gerakan Aceh Merdeka dahulu ketika konflik Aceh berlangsung. Saat ini, baik Zaini, Muzakir, maupun Zakaria juga menduduki posisi sentral dalam kepemimpinan Partai Aceh. Zaini Abdullah dan Zakaria Saman adalah anggota dewan pertimbangan Partai Aceh, sedangkan Muzakir Manaf adalah Ketua Partai Aceh. Oleh karena itu, bukan

hal yang mengejutkan ketika ketiga tokoh ini saling bersaing untuk mencari dukungan agar diusung oleh Partai Aceh pada pemilihan gubernur 2017 mendatang.

Di sisi lain juga hadir nama mantan kombatan GAM yang sekaligus merupakan mantan Gubernur Aceh terpilih periode 2007-2012 yaitu Irwandi Yusuf. Ketika itu Irwandi maju melalui jalur independen karena partai lokal yakni Partai Aceh belum terbentuk. Namun demikian, proses pencalonan Irwandi didukung penuh oleh struktur lama Gerakan Aceh Merdeka sehingga mampu meraup banyak suara dan memenangkan pemilihan gubernur. Setelah satu periode berjalan, pada tahun 2012 Irwandi kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh dan berharap Partai Aceh sebagai salah satu partai lokal akan memberikan dukungan untuk pencalonannya. Namun, ternyata Partai Aceh justru mendukung pasangan yang berbeda yaitu Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf yang merupakan tokoh sentral perjuangan Aceh Merdeka yang juga petinggi Partai Aceh. Kekecewaan Irwandi dan para pendukungnya akhirnya mendorong mereka untuk membentuk partai lokal baru yaitu Partai Nasional Aceh (PNA). Mayoritas anggota PNA dulunya adalah mantan kombatan GAM yang juga kecewa dengan Partai Aceh karena dianggap sudah keluar dari cita-cita perjuangan GAM dulu ketika konflik.

Pemaparan di atas memberikan sedikit gambaran bahwa pelembagaan Partai Aceh masih lemah dan rentan menimbulkan konflik yang berujung pada perpecahan partai. Bukan tidak mungkin, ketika hanya salah satu dari ketiga calon yang saat ini berambisi untuk menjadi Gubernur Aceh pada akhirnya diusung oleh partai untuk menjadi calon gubernur, maka perpecahan akan kembali terjadi seperti siklus yang berulang dan pada akhirnya akan melemahkan Partai Aceh.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study). Metode studi kasus adalah metode pengumpulan informasi yang cukup secara sistematis tentang orang tertentu, pengaturan sosial, peristiwa, atau kelompok untuk memungkinkan peneliti memahami secara efektif bagaimana hal tersebut beroperasi atau berfungsi (Berg, 2001). Studi kasus digunakan untuk mengetahui dan memahami proses kandidasi dalam Partai Aceh. Metode studi kasus ini juga digunakan untuk menggabungkan sejumlah langkah pengumpulan data dari studi lapangan dan data pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partai Aceh Dalam Dinamika Politik Lokal

Sebagai sebuah partai lokal yang dibentuk oleh mantan anggota dan pimpinan dalam Gerakan Aceh Merdeka, Partai Aceh cenderung dipandang sebagai salah satu partai gubahan dari organisasi bersenjata GAM. Turbulensi internal dan eksternal yang terjadi dalam tubuh Partai Aceh di awal pembentukannya juga dilatarbelakangi oleh kecukupan banyak kalangan bahwa Partai Aceh hanyalah bentuk lain dari perjuangan bersenjata yang kini berwajah politik. Hal tersebut bukan hal mengejutkan karena sejak awal kemunculannya Partai Aceh telah menimbulkan banyak kontroversi. Kontroversi pertama terkait penggunaan nama Partai GAM untuk partai dan yang kedua adalah penggunaan bendera GAM sebagai bendera dan lambang partai.

Secara struktural keanggotaan Partai Aceh juga cenderung lebih terbuka bila dibandingkan dengan keanggotaan GAM. Keterbukaan ini dapat dilihat melalui proses rekrutmen anggota yang terbuka. Selain karena alasan administratif, hal tersebut juga dilatarbela-

kangi oleh logika politik untuk memperkuat basis suara dan secara struktural hal ini menjadi sangat logis karena logika suara mayoritas memegang andil besar bagi keterpilihan atau kemenangan Partai Aceh dalam pemilu. Namun demikian, Partai Aceh dalam hal kandidasi serupa dengan GAM dengan melakukan pangangkatan seorang anggota menjadi

panglima dengan sama-sama mengutamakan aspek popularitas atau pengaruh pada sebuah kawasan perlawanan (Pane, 2011) dan dalam pencalonan seorang kandidat yang maju dalam pemilihan umum berdasarkan tingkat popularitas dan pengaruh di daerah pemilihan.

Tabel 1
Kombatan GAM yang Menjadi Kandidat Gubernur Partai Aceh

Kandidat Gubernur	Jabatan Dalam GAM	Jabatan dalam Partai Aceh
Muzakir Manaf	Ketua Partai Aceh	Mantan Panglima GAM
Zaini Abdullah	Dewan Pertimbangan Partai Aceh	Mantan Menteri Luar Negeri GAM
Zakaria Saman	Dewan Pertimbangan Partai Aceh	Mantan Menteri Pertahanan GAM

Sumber: Diolah dari berita-berita di Harian Serambi Indonesia

Sebagian besar panglima dan tentara GAM memiliki keterkaitan sosial di daerah dan di kampung yang menjadi basis perlawanan mereka. Beberapa bekas pejuang yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka jarang bepergian jauh dari rumah. Mereka juga melukiskan betapa mudahnya mereka mondar-mandir mendatangi kampung halaman dan kembali ke pangkalan militernya di masa yang lebih damai. Jalinan ikatan sosial yang erat ini semakin memperkuat jaringan patrimonial yang telah ada di kalangan para panglima dan masyarakat pedesaan, serta mengembangkan sistem patronase baru di tengah struktur ganda pemerintahan.

Selama masa perang GAM mengumpulkan pajak, atau terkadang memaksa pengiriman pasokan makanan dan mempertahankan praktek ekonomi dengan watak predatornya. Sifat koersif dari sistem patrimonialisme lokal tersebut meski memiliki bentuk beragam di berbagai daerah semakin memperkuat despotisme para panglima GAM. Seperti gam-

baran analisis tentang para elit lokal di tengah proses perubahan politik yang ekspansif di Indonesia, reformasi dalam kebijakan desentralisasi membuka suatu ruang ganda bagi penguatan demokrasi lokal di satu sisi, dan mengembangkan despotisme kedaerahan di sisi lain (Nordholdt, 2004; Crouch dan Aspinnall, 2003). Bahkan di tengah kebangkitan GAM dalam menghadapi status darurat militer pada 2003, struktur-struktur tersebut tidak tergantikan oleh struktur negara yang formal. Sebaliknya, struktur itu tetap bertahan sebagai jaringan patronase tandingan bagi struktur elit lokal yang resmi.

Ketika gerakan perlawanan itu melakukan pengorganisasian ulang demi membentuk partai-partai politik, jaringan-jaringan tersebut menjadi struktur mobilisasi tersignifikan dalam tatanan sistem pemilu. Struktur ekspansi militer yang mampu bertahan dan penguatan kepemimpinan lokal menjadi struktur kesempatan penting kedua yang mengarahkan transformasi GAM. Perubahan

cita-cita pada level puncak berkisar pada perubahan gagasan yang lebih menjunjung ide-ide reformasi. Dimensi ini lah yang menjamin perluasan politik GAM, dan aliansi mereka dengan gerakan pro-referendum. Namun, pembahasan di atas juga menggambarkan dualisme GAM sebagai suatu gerakan perlawanan, yang juga memiliki sifat yang menghegemoni dan non-liberal. Kedua proses transformasi yang berjalan beriringan itu merupakan jalur signifikan bagi GAM sebagai aktor politik. Ketika keputusan untuk mengorbankan dan mengakhiri perang ditentukan oleh para pemimpin senior yang terpercaya di Swedia, parameter GAM pada tataran lokal lebih banyak tergantung pada struktur yang menentang pelaksanaan demokrasi yang inklusif.

Persoalan Kandidasi Politik di Tubuh Partai Aceh

Dalam ilmu politik proses penyusunan calon disebut juga sebagai kandidasi. Kandidasi dapat dimaknai sebagai proses bagaimana kandidat dipilih dari kandidat-kandidat yang potensial. Kandidasi merupakan salah satu fungsi partai yang penting dan partai yang gagal menjalankan fungsi ini dapat dikatakan telah berhenti sebagai partai politik (Field dan Siavelis, 2008). Terhadap tiga tahapan dalam proses politik elektoral saat ini yaitu *elite selection*, *constitutional qualification*, dan *public election*.

Gambar 1
Ilustrasi Proses Kandidasi



Singkatnya, ada *selection* yang selalu mendahului *election*. Dalam *selection* inilah nalar elit bekerja, sebelum sampai pada *qual-*

ification (prasyarat konstitusional) dan *election* (pemilihan umum) yang menjadi nalar publik dan mewarnai debat politik saat ini. Artinya bahwa pada level *selection* inilah, politik elektoral tak banyak disentuh karena semua berbondong-bondong melihat *public election*.

Tiga tahapan ini adalah refleksi atas proses kandidasi seorang kader partai (atau bukan kader) hingga duduk di kursi jabatan publik seperti kepala daerah. Pertama, calon harus mendapat persetujuan elit partai untuk dicalonkan (*elite selection*). Kedua, harus memenuhi prasyarat dan kualifikasi sebagai kandidat berdasarkan regulasi yang berlaku (*constitutional qualification*). Ketiga, harus terpilih (*public election*) dalam pemilu untuk mendapatkan kursi jabatan politik (kepala daerah, presiden, anggota dewan). Dalam beberapa kasus terkait kandidasi kepala daerah, kandidat bisa jadi hanya melalui *constitutional qualification* dan *public election* karena terbukanya calon independen.

Namun demikian, secara sederhana Rahat dan Hazan (2001) mengatakan bahwa dalam proses kandidasi terdapat empat hal penting yang dapat menunjukkan bagaimana partai politik dalam menentukan calon yang diusung. Pertama terkait siapa kandidat yang dapat dinominasikan (*candidacy*), kedua, siapa yang akan melakukan seleksi (*selectorate*), ketiga, dimana kandidat tersebut diseleksi, dan keempat, bagaimana selanjutnya kandidat diputuskan. Apabila proses ini berjalan dengan benar sesuai prosedur maka akan diperoleh kandidat yang berkualitas dan kompeten dari partai politik.

Belajar dari pengalaman Aceh, persoalan kandidasi menjadi isu yang sensitif dan menjelaskan banyak hal “suram” tentang partai politik (Galagher, 1998). Dalam tubuh Partai Aceh kandidasi menunjukkan di mana locus kekuasaan di partai politik berada. Para mantan kombatan yang dulunya adalah petinggi atau panglima GAM memiliki kesempatan yang lebih besar untuk dicalonkan oleh Partai

Aceh daripada tokoh baru yang bergabung dalam Partai Aceh setelah masa damai. Pada dasarnya kekuasaan dalam partai politik dapat bersifat oligarkis atau pun menyebar. Namun, yang terjadi dalam Partai Aceh serupa dengan yang diungkapkan oleh Schattschneider yaitu “siapa yang menentukan kandidasi politik maka dia adalah the owner of the party”.

Dalam bahasa yang berbeda, Pareto mengatakan bahwa kandidasi dapat dilihat sebagai sebuah sirkulasi elit yaitu proses perputaran kekuasaan di kalangan elit saja. Para mantan kombatan kini telah menjadi kontraktor bisnis berpengaruh yang mengharapkan jaminan akses terhadap sumber daya publik karena itu mereka akan cenderung mendukung tokoh yang merupakan sesama pejuang ketika masa konflik dengan harapan akan memperoleh “timbang-balik” keuntungan kekuasaan sekaligus sebagai politik representasi bahwa mereka masih setia sebagai individu yang pendukung GAM.

Signifikannya proses penyusunan daftar calon (kandidasi) mengharuskan partai politik untuk serius dalam menghadirkan figur-figur yang kredibel, berintegritas, dan memiliki kapasitas tinggi agar masyarakat dapat memilih calon yang dapat dipercaya dan merepresentasikan kepentingannya. Kandidasi pada akhirnya memperlihatkan tipe kepartaian. Melalui kandidasi bentuk partai dapat dibedakan Partai yang bertipe elektoralis dan catch all cenderung terbuka bagi semua komponen masyarakat dalam proses seleksi. Sedangkan Partai Aceh sebagai salah satu partai lokal menganut sistem tertutup dalam proses seleksi kandidat. Calon yang diusung oleh partai adalah figur internal partai yang telah mengakar kuat dalam struktur sejak Gerakan Aceh Merdeka dulu.

Menurut Czudnomski (Fadillah Putra, 2008) dalam proses menentukan calon yang diusung partai politik memiliki beberapa pertimbangan, pertama dengan cara partisan yaitu pendukung yang kuat dan loyal ter-

hadap partai sehingga dipilih oleh partai untuk menduduki jabatan strategis yang ditawarkan. Kedua, *compartmentalization* yaitu proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang. Ketiga, *immediate survival* yaitu proses penentuan calon yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang direkrut. Keempat, *civil service reform*, merupakan proses penentuan calon berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau lebih tinggi.

Dari keempat pertimbangan di atas, Partai Aceh dalam menentukan calon gubernur cenderung ditentukan oleh pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang yang akan diusung (*immediate survival*). Untuk kasus pemilihan gubernur 2017 nanti, dapat diramalkan bahwa calon yang akan diusung oleh Partai Aceh adalah Muzakir Manaf karena saat ini Muzakir adalah pimpinan tertinggi partai atau Ketua Umum Partai Aceh sehingga peluangnya untuk diusung oleh partai menjadi lebih besar dibandingkan peluang dua calon lainnya yaitu Zaini Abdullah dan Zakaria Saman.

Kondisi ini diperparah oleh pola yang digunakan oleh Partai Aceh dalam menentukan calon. Mekanisme penentuan calon menurut Czudnomski (Fadillah Putra, 2008) menganut dua pola yaitu pola terbuka dan tertutup. Pola terbuka mengharuskan syarat dan prosedur untuk menampilkan seorang tokoh untuk diketahui secara luas. Dengan demikian partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politik yang dicalonkan oleh partai politik untuk bertarung dalam pemilihan.

Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini sangat kompetitif dan

berfungsi sebagai sarana rakyat untuk mengontrol legitimasi politik para elit. Beberapa manfaat dari pola terbuka adalah mekanisme penentuan calon demokratis, tingkat kompetisi politik sangat tinggi dan masyarakat mampu memilih pemimpin yang benar-benar dikehendaki, tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi, melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi.

Sedangkan pola kedua yaitu pola tertutup yang digunakan oleh Partai Aceh mengandaikan syarat dan prosedur pencalonan secara tertutup dan tidak diketahui umum. Dengan demikian Partai Aceh berkedudukan sebagai promotor dari elit yang berasal dari

dalam tubuh dan lingkaran sekitar partai sendiri untuk dicalonkan sebagai kandidat gubernur. Akibatnya masyarakat Aceh tidak memiliki peluang dan kesempatan untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang dicalonkan oleh Partai Aceh dan hal ini pada akhirnya akan menghasilkan pilihan-pilihan politik yang terbatas bagi masyarakat dan cenderung tidak kompetitif. Demokrasi dan pemilihan umum hanya berfungsi sebagai sarana bagi partai dan elit untuk memperbarui legitimasi politiknya di dalam pemerintahan, sedangkan masyarakat hanya bertindak sebagai penonton “di pinggir jalan” saja. Untuk lebih jelasnya, bentuk dan karakteristik Partai Aceh dapat dilihat di tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Bentuk Organisasi Partai Aceh

Variabel	Partai Aceh
Karakter Partai	Inklusif
Paradigma	<i>PA-power-resources</i>
Jenis Kepemimpinan	Tersebar
Cara pengambilan keputusan/ <i>Decision making</i>	<i>Patronase-tend to-democratic</i>
Level organisasi	<i>23 wilayah administrative</i>
Sifat organisasi	Formal-profesional
Rekrutmen	Terbuka
Kandidasi	Pragmatis
Motif anggota	Kekuasaan

Sumber: Diolah dari data penelitian

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam melakukan kandidasi Partai Aceh cenderung pragmatis tanpa melakukan pertimbangan-pertimbangan politik yang rasional. Dalam hal kandidasi, partai politik seharusnya melakukan kaderisasi di dalam partai yaitu proses rekrutmen dalam partai politik yang nantinya akan menghasilkan orang-orang baru yang kompeten dan menjamin sirkulasi elit partai. Pada tahap selanjutnya, kader-kader akan diarahkan untuk menjadi kandidat guna mengisi jabatan publik (Pamungkas, 2009). Sumber kader diperoleh melalui beberapa cara diantaranya

dari partai politik melalui pendidikan politik, dari organisasi sayap yang sengaja dibentuk untuk menjaring kader maupun ormas yang menjadi underbow partai, dan dari organisasi masyarakat yang se-ideologi dengan partai (Hamid, 2008). Apabila partai politik mencalonkan non-kader sebagai kandidat jabatan publik menunjukkan macetnya proses kaderisasi ini dan hal ini terjadi pada Partai Aceh. Di mana, Partai Aceh hanya memilih kandidat dari kalangan elitnya sendiri yaitu mantan petinggi atau kombatan yang dulu pernah berjuang dalam GAM tanpa mempertimbangkan kualitas dan kemungkinan muncul-

nya kandidat “berwajah” baru yang mampu memimpin Aceh dengan lebih baik di masa depan.

KESIMPULAN

Partai Aceh sebagai salah satu partai lokal menjelang pemilihan gubernur 2017 mulai memunculkan beberapa nama yang akan diusung sebagai kandidat gubernur. Diantaranya adalah Zaini Abdullah yang juga merupakan petahana (incumbent) dan dewan pertimbangan Partai Aceh saat ini. Zaini Abdullah memiliki peluang dan basis dukungan yang besar dari kalangan GAM mengingat dia juga merupakan mantan Menteri Luar Negeri GAM ketika masa konflik Aceh berlangsung. Di pihak lain juga muncul nama Zakaria Saman, dewan pertimbangan Partai Aceh yang dulunya merupakan mantan Menteri Pertahanan GAM yang memiliki pengaruh besar di kalangan simpatisan Partai Aceh. Dan satu nama yang tidak asing lagi adalah Muzakir Manaf yang kini merupakan Ketua Umum Partai Aceh sekaligus mantan Panglima GAM. Nama Muzakir digadang-gadang memiliki basis suara yang sangat besar dari mantan kombatan dan panglima GAM se-Aceh. Saat ini dia juga merupakan wakil gubernur Aceh mendampingi Zaini Abdullah.

Ketiga nama di atas memiliki basis dukungan yang sama di Partai Aceh yaitu memanfaatkan jaringan dan simpatisan Gerakan Aceh Merdeka untuk diusung pada pemilihan gubernur Aceh 2017. Namun tentu saja, sebagai sebuah partai politik Partai Aceh hanya boleh mengusung satu nama saja untuk dicalonkan sebagai gubernur. Pada akhirnya pemilihan kepala daerah 2017 memicu konflik internal di dalam tubuh Partai Aceh. Keretakan tersebut sudah dapat dilihat sejak sekarang dimana ketiga calon saling sindir di media massa. Kondisi ini diperparah oleh pola kandidat Partai Aceh yang sangat tertutup dan tidak transparan. Bukan tidak mungkin, hengkangnya Irwandi Yusuf dari Partai Aceh

pada 2012 lalu dan akhirnya memilih untuk membentuk partai baru sendiri yaitu PNA (Partai Nasionalis Aceh) setelah tidak diberi kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi gubernur melalui Partai Aceh akan kembali terulang pada pemilihan gubernur tahun 2017 mendatang mengingat pola kandidat yang digunakan oleh Partai Aceh masih menggunakan pola yang lama yaitu pola tertutup dan pragmatis. Dua calon yang gagal menggunakan Partai Aceh sebagai perahu politik akan merasa kecewa dan membentuk partai baru dan hal ini mengindikasikan kegagalan Partai Aceh dalam hal pelebagaan partai.

Partai Aceh merupakan harapan dan simbol kebangkitan bagi rakyat Aceh. Melalui Partai Aceh rakyat berharap akan hadirnya kemakmuran dan kesejahteraan setelah konflik yang berkepanjangan. Namun, ketika perpecahan dalam tubuh Partai Aceh terus terjadi dalam setiap pemilihan kekuatan Partai Aceh akan terus tergerus dan dukungan dari simpatisan dan rakyat akan terpecah dan berkurang akibatnya rakyat akan berhenti untuk percaya dan memilih partai lain yang dianggap lebih transparan dan kuat dalam hal pelebagaan. Partai Aceh yang merupakan lambang demokratisasi di Aceh pada akhirnya hanya akan tinggal nama dan hilang dalam percaturan politik lokal di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambardi, K. (2009). *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Politik Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Gramedia
- Bakti, Ikrar Nusa. (2008). *Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*. Jakarta: P2P LIPI
- Basyar, Hamdan. (2008). *Aceh Baru: Tantangan Perdamaian Dan Reintegrasi*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar

- Berg, R dan Nirmala (ed). (2005). *Transforming Local Political Leadership*. New York: Palgrave Macmillan
- Budi, A. (2012). *Partai Aceh: Transformasi GAM?* Yogyakarta: PolGov
- Damanik, A. T. (2010). *Hasan Tiro: dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno-Nasionalis*. Jakarta: FES dan AFI
- Davies, M. N. (2006). *Indonesia's War over Aceh: Last Stand on Mecca's Porch*. New York: Routledge
- Djumala, D. (2013). *Soft Power untuk Aceh: Resolusi Konflik dan Desentralisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Hadiniwata (eds). (2010). *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka: Dari Kotak Peluru Ke Kotak Suara, Sebuah Kisah Sukses Program Transformasi Kombatan di Aceh*. Jakarta: FES
- Hamid, A.F. (2005) *Partai Politik Lokal di Aceh: Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*. Jakarta: Kemitraan
- Heidar, K. (2006). *Party Membership and Participation*. New Delhi: Sage Publication
- Kawilarang, H. (2008). *Aceh Dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*. Banda Aceh: Bandar Publishing
- Mar'iyah, C. dan R. Suwarso. (2013). *Belajar dari Politik Lokal*. Jakarta: UI Press
- Nurhasim dkk. (2008). *Aceh Baru: Tantangan Perdamaian Dan Reintegrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- _____, (2008). *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka: Kajian tentang Konsensus Normatif antara RI-GAM dalam Perundingan Helsinki*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tornquist, O. (ed), dkk. (2011). *Aceh: Peran Demokrasi Bagi Perdamaian dan Rekonstruksi*. Yogyakarta: PCD Press Indonesia
- Pamungkas, S. (2011). *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfareism
- Pane, N. S. (2001). *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka: Solusi, Harapan, dan Impian*. Jakarta: PT Grasindo
- Reid, A. (2005). *Asal Usul Konflik Aceh: dari Perebutan Pantai Timur Permata Hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19*. Jakarta: Yayasan Obor
- Tippr, S. (2000). *Aceh di Persimpangan Jalan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo